



**CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**TIA ATIKAH**

NPM: 1515210063

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

## ABSTRAK

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sampel yang diteliti yaitu data dari tahun 2002 sampai 2017. Jumlah variabel independen yang diteliti adalah sebanyak 8 variabel. Data yang diolah dengan menggunakan analisis uji faktor kemudian menggunakan regresi linear berganda. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara diolah dengan menggunakan *software* SPSS Versi 16.0 *For Windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 8 variabel yang dianalisa dengan model analisis faktor yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara. Faktor-faktor tersebut terdiri dari 2 faktor yaitu faktor upah minimum dan kesehatan. Berdasarkan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa upah minimum dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

**Kata Kunci :** Kemiskinan, Pengangguran, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Kesehatan, Belanja Daerah, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia.

## **ABSTRACT**

---

*This study aims to analyze the factors that influence the index of human development in North Sumatra Province. The data used is secondary data. The sample studied was data from 2002 to 2017. The number of independent variables studied was 8 variables. Data processed using factor test analysis then uses multiple linear regression. Data obtained from the Central Statistics Agency of North Sumatra Province were processed using SPSS Version 16.0 for Windows software. The results showed that of the 8 variables analyzed with a factor analysis model which were factors that influenced the human development index in North Sumatra Province. These factors consist of 2 factors, namely the minimum wage and health factors. Based on multiple linear regression analysis shows that minimum wages and health have a positive and significant effect on the development index in North Sumatra Province.*

***Keywords: Poverty, Unemployment, Minimum Wages, Economic Growth, Education Level, Health, Regional Expenditures, Gini Index, Human Development Index.***

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Perumusan Masalah .....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
F. Keaslian Penelitian .....	12
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	14
1. Indeks Pembangunan Manusia.....	14
2. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia.....	17
3. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia.....	19
4. Indeks Pembangunan Manusia Tradisional .....	20
5. Indeks Pembangunan Metode Baru .....	21
6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia .....	24
a. Kemiskinan .....	24
b. Pengangguran .....	27
c. Upah Minimum .....	29
d. Pertumbuhan Ekonomi .....	30
e. Tingkat Pendidikan .....	32
f. Kesehatan .....	33
g. Belanja Daerah .....	35
h. Indeks Gini .....	38
B. Penelitian Terdahulu .....	39
C. Kerangka Pemikiran .....	43
D. Hipotesis.....	45

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Pendekatan Penelitian .....	46
	B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	46
	C. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	47
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
	E. Teknik Analisa Data.....	49
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Hasil Penelitian .....	59
	1. Kondisi Geografis .....	59
	2. Penduduk Miskin Sumatera Utara .....	60
	3. Perkembangan Pengangguran Provinsi Sumatera Utara.....	61
	4. Perkembangan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara .....	62
	5. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara .....	63
	6. Perkembangan Pendidikan Sumatera Utara .....	64
	7. Perkembangan Kesehatan Sumatera Utara .....	66
	8. Perkembangan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	67
	9. Perkembangan Indeks Gini Sumatera Utara .....	69
	10. Analisis Uji Faktor .....	69
	11. Pengujian Asumsi Klasik .....	78
	12. Pengujian Hipotesis.....	82
	B. Pembahasan.....	85
	1. Analisis Hasil <i>Confirmatory Factor Analysis</i> (CFA).....	85
	2. Analisis Regresi Linear Berganda.....	90
	a. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	90
	b. Pengaruh Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	92
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Simpulan .....	95
	B. Saran.....	95

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan IPM, Kemiskinan, Pengangguran, Upah Minimum, Pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pendidikan, Kesehatan, Belanja Daerah dan Indek Gini di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017.....	2
Tabel 1.2 Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang.....	12
Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Komponen IPM.....	23
Tabel 2.2 <i>Mapping</i> Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian.....	46
Tabel 3.2 Definisi Operasionalis dan Pengukurab Variabel.....	47
Tabel 4.1 Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2002-2017 ...	60
Tabel 4.2 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2017 .....	65
Tabel 4.3 KMO and Bartlett's Test .....	70
Tabel 4.4 <i>Anti-image Matrices</i> .....	71
Tabel 4.5 <i>Communalities</i> .....	72
Tabel 4.6 <i>Total Variance Explained</i> .....	74
Tabel 4.7 <i>Component Matrix<sup>a</sup></i> .....	76
Tabel 4.8 <i>Rotated Component Matrix<sup>a</sup></i> .....	77
Tabel 4.9 Uji Normalitas Data.....	80
Tabel 4.10 Uji Multikolinieritas .....	81
Tabel 4.11 Regresi Linier Berganda .....	82
Tabel 4.12 Uji Simultan.....	83

Tabel 4.13 Uji Parsial .....	84
Tabel 4.14 Koefisien Determinasi .....	85

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pergerakan Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan.....	5
Gambar 1.2 Pergerakan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Kesehatan..	6
Gambar 1.3 Pergerakan Upah Minimum Dengan Belanja Daerah.....	7
Gambar 1.4 Pergerakan Indeks Gini .....	8
Gambar 2.1 Diagram Perhitungan IPM .....	20
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian CFA ( <i>Confirmatory Faktor Analysis</i> ).....	44
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian Setelah Uji CFA ( <i>Confirmatory Faktor Analysis</i> ).....	45
Gambar 4.1 Perkembangan Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2017 .....	62
Gambar 4.2 Perkembangan Upah Minimum di Sumatera Utara Tahun 2002-2017 .....	63
Gambar 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara Tahun 2002-2017 .....	64
Gambar 4.4 Perkembangan Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2002-2017 .....	67
Gambar 4.5 Perkembangan Belanja Daerah Provisnsi Sumatera Utara Tahun 2002-2017 .....	68
Gambar 4.6 Perkembangan Indeks Gini Provisnsi Sumatera Utara Tahun 2002-2017 .....	69



Gambar 4.7	<i>Scree plot Component Number</i> .....	75
Gambar 4.9	Regresi Linear Berganda .....	78
Gambar 4.10	Histogram Uji Normalitas .....	79
Gambar 4.11	<i>Scatterplot</i> Uji Heteroskedastisitas .....	81

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Confirmatory Factor Analysis* Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara”. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Bakhtiar Effendi, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Drs. H. Kasim Siyo, M.Si, Ph.D selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Rahmad Sembiring, SE., M.SP, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Teristimewah ucapan terima kasih kepada Ibu dan Ayah ku tercinta yang telah banyak mendoakan dan memberikan motivasi serta bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen pengajar dan Staff Administrasi pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

8. Kepada sahabat ku Nabila Ginting, Maghfira Qurratu, Khairunnisa serta seluruh anggota Subregwil 234SC Sunggal Deli Serdang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Desember 2019

Penulis

Tia Atikah  
NPM 1515210063

## LEMBARAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat kulemah tak berdaya (Ayah dan Ibu tercinta) yang selalu memanjatkan doa kepada putra Mu tercinta dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk semuanya.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, karena tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian tapi hidup tanpa tujuan. Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan, pastinya juga harus diimbangi dengan tindakan nyata, agar mimpi dan juga angan, tidak hanya menjadi sebuah bayangan semu.

Setulus hatimu Ibu, searif arahanmu Bapak

Doamu hadirkan keridhaan utukku, petuahmu tuntunkan jalanku  
Pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan doa malam mu

Dan seabait doa telah merangkul diriku, menuju hari depan yang cerah

Kini diriku telah selesai dalam studi sarjana

Dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridhaan-Mu ya Allah,  
Kupersembahkan karya tulis ini untuk yang termulia, Bapak... mamak...

Mungkin tak dapat selalu terucap, namun hati ini selalu bicara,

sungguh ku sayang kalian.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi yang paling penting adalah keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi disegala bidang pembangunan (Badan Pusata Stastistik, 2011).

Pembangunan secara tradisional dapat diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama menuju peningkatan pendapatan nasional bruto atau GNI (*gross national income*) tahunan (Todaro, 2006:19). Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat secara berkelanjutan dalam jangka panjang (Sukirno, 2010: 11).

Pada hakikatnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan total dari suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Pembangunan memiliki tujuan akhir yaitu bergerak maju menuju kondisi kehidupan yang lebih baik.

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang pada saat ini adalah pembangunan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia

(*human development*). Perubahan paradigma pembangunan pada dasarnya menjadikan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan sebagai alat pembangunan. Pembangunan manusia menekankan terpenuhinya kehidupan yang layak bagi manusia, baik layak secara materi maupun non materi.

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index* yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM berkisaran antara 0 hingga 100 dengan rincian IPM yang kecil dari 50 termasuk kategori rendah, IPM dari 50 sampai 80 termasuk kategori sedang/menengah dan IPM besar dari 80 termasuk kategori tinggi.

**Tabel 1.1 Perkembangan IPM, Kemiskinan, Pengangguran, Upah Minimum, Pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pendidikan, Kesehatan, Belanja Daerah dan Indek Gini di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017**

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
IPM	68,36	68,87	69,51	70	70,57
Kemiskinan	10,39	9,85	10,53	10,35	10,22
Pengangguran	6,53	6,23	6,71	5,84	5,6
Upah Minimum	1.375.000	1.505.900	1.625.000	1.811.875	1.961.355
Pertumbuhan Ekonomi	6,07	5,23	5,1	5,18	5,12
Tingkat Pendidikan	9,13	10,77	10,92	11,06	11,17
Kesehatan	69,9	68,04	68,29	68,33	68,37
Belanja Daerah (Milyar Rupiah)	7.260,47	7.808,56	7.959,17	9.474,42	13.034,68
Indeks Gini	0,354	0,321	0,336	0,319	0,315

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dalam Angka, 2014-2018

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan suatu alat ukur kualitas hidup masyarakat dengan melihat dari tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia mengakibatkan produktivitas kerja penduduk juga berkurang. Ada beberapa manfaat dari Indeks Pembangunan Manusia diantaranya, untuk menegaskan bahwa kriteria utama dalam menilai pembangunan suatu Negara bukan Pertumbuhan Ekonomi.

Selain indeks pembangunan manusia penurunan pengangguran di suatu Negara diharapkan juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif untuk mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 1997). Pengangguran dapat terjadi karena ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Badan Pusat Statistik, 2007). Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua Negara. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator dalam mengatasi masalah kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi merupakan konsep dari pembangunan ekonomi (Atalay, 2015).

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Bappeda, 2011) oleh karena itu tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi nilai IPM.

Berbagai studi empiris yang telah ada menunjukkan bahwa harapan pembangunan ekonomi adalah untuk membawa perbaikan ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan, standar pendidikan yang lebih baik atau perbaikan kesehatan (Cremin dan Nakabugo, 2012). Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat menjadi kekuatan pendorong untuk menghasilkan kekayaan yang nantinya akan menetes kebawah untuk memberantas kemiskinan.

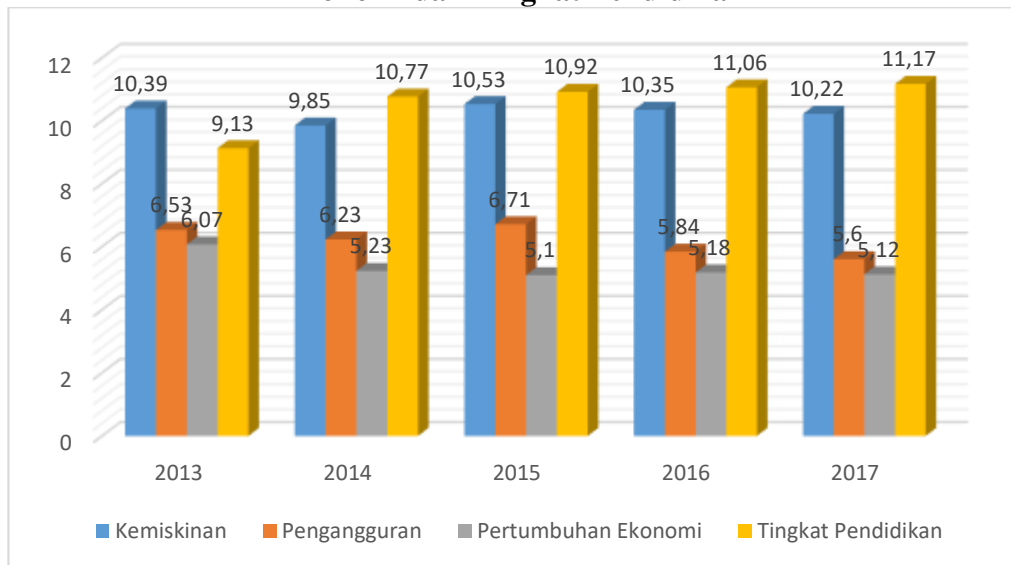
Disisi lain pengangguran merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Pengangguran, setengah menganggur, atau kurangnya lahan produktif sebagai asset penghasil pendapatan merupakan hal yang akut bagi masyarakat miskin ketika dalam memperoleh kebutuhan paling dasar untuk makanan, air, dan tempat tinggal adalah hal yang harus diperjuangkan pada setiap harinya (Kristianto, 2017).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila



seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan factor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan (Bappeda. 2011).

**Gambar 1.1 Pergerakan Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2014-2018

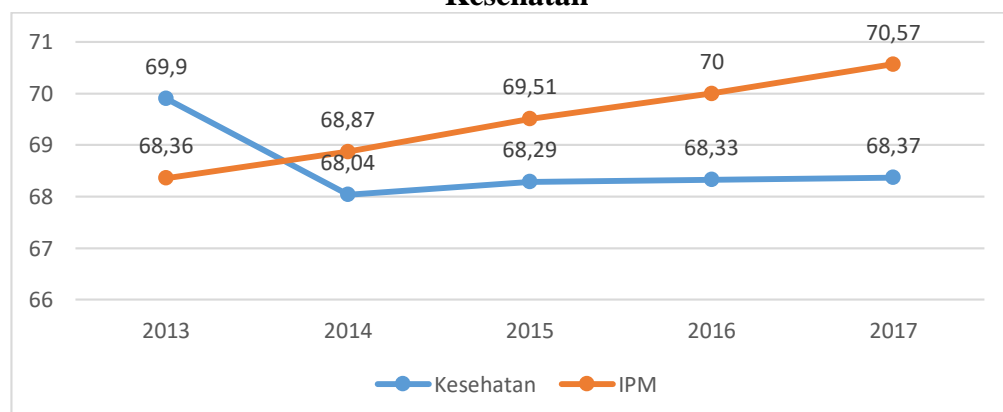
Berdasarkan pada gambar diatas bahwa kemiskinan sejalan dengan tingkat pengangguran di Sumatera Utara dimana kenaikan dan penurunan persentase kemiskinan selalu diikuti dengan pengangguran. Pada tahun 2014 kemiskinan mengalami penurunan pengangguran juga mengalami penurunan. Pada tahun 2015 kemiskinan mengalami kenaikan pengangguran juga mengalami kenaikan. Hal yang unik dalam gambar tersebut adalah pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan menurun sedangkan kemiskinan dan pengangguran juga menurun hal ini tidak sesuai dengan teori.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik ditingkat pusat

maupun daerah. Sering terjadi ketimpangan pembangunan antara satu provinsi dengan provinsi lain. Hal ini lebih disebabkan belum adanya sistem yang baik meratanya pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia Sehingga pertumbuhan pembangunan manusia di setiap provinsi di Indonesia berbeda-beda. Proses desentralisasi membuat setiap daerah dapat melakukan kebijakan-kebijakan fiskal yang difungsikan untuk membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri dalam pembangunan ekonomi.

Kesehatan masyarakat Sumatera Utara umumnya juga cenderung mengalami perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (e0), Angka Kematian Bayi (IMR), dan Total Kelahiran (TFR). Pada tahun 2016, setiap bayi lahir hidup memiliki harapan hidup sebesar 68,04 tahun, terjadi kenaikan menjadi 68,29 tahun pada tahun 2015. Angka harapan hidup ini didapat dengan menggunakan IPM Metode terbaru. Sementara itu pada tahun 2010, ada sebanyak 26 bayi meninggal dari 1.000 bayi lahir hidup, angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 27 per 1.000 kelahiran.

**Gambar 1.2 Pergerakan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Kesehatan**



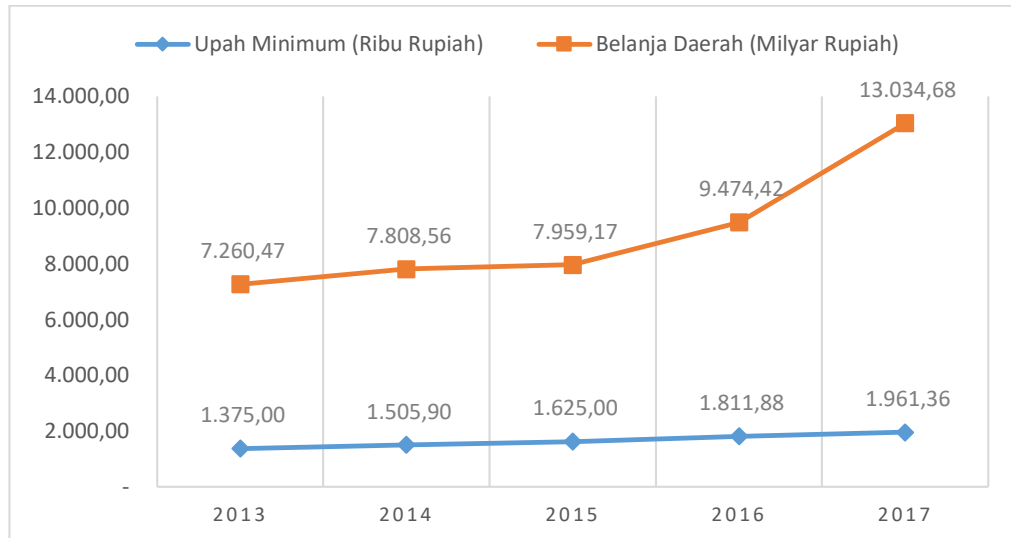
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2014-2018

Pada gambar diatas terlihat bahwa pergerakan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara tidak selalu diikuti oleh tingkat kesehatan. Dimana pada tahun 2014 indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan sedangkan tingkat kesehatan menurun menjadi sebesar 68,04 persen. Kemudian pada tahun 2015 sampai 2017 indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan tingkat kesehatan mengalami kenaikan.

Masalah tenaga kerja tidak terlepas dari upah minimum regional (UMR). Upah minimum ini merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi upah minimum regional suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya (Bappeda. 2010).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui dimensi-dimensinya hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah daerah harus mempunyai suatu perencanaan yang baik untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Rencana-rencana tersebut disusun secara matang agar kelak dijadikan sebagai pedoman dalam langkah pengelolaan keuangan daerah. Rencana-rencana pemerintah daerah untuk melaksanakan keuangan daerah tersebut dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja daerah dipilih berdasarkan sektor kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang harus diselenggarakan maupun dipenuhi oleh pemerintah daerah.

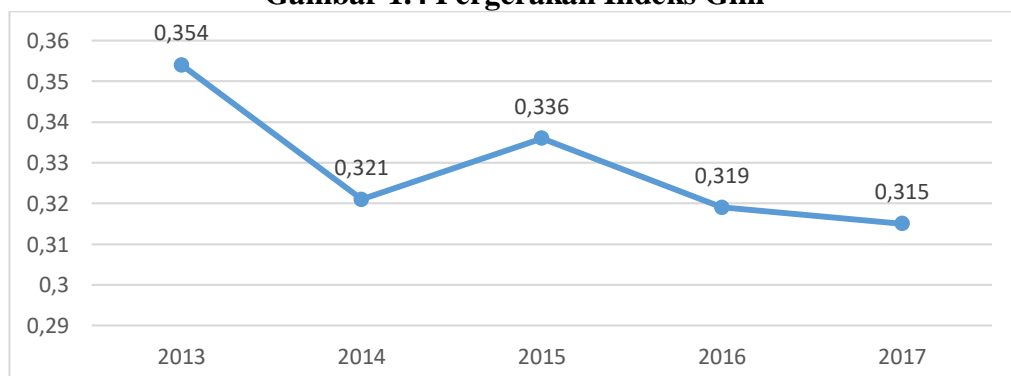
### **Gambar 1.3 Pergerakan Upah Minimum Dengan Belanja Daerah**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2014-2018

Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa perkembangan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara selalu diikuti oleh upah minimum. Pada tahun 2014 belanja daerah meningkat menjadi sebesar Rp 7.808,56 Milyar dan upah minimum meningkat menjadi sebesar Rp 1.505.900. Pada tahun 2015 belanja daerah meningkat menjadi sebesar Rp 7.959, 17 Milyar dan upah minimum meningkat menjadi sebesar Rp 1.625.000. Pada tahun 2016 belanja daerah meningkat menjadi sebesar Rp 9.474,42 Milyar dan upah minimum meningkat menjadi sebesar Rp 1811875. Pada tahun 2017 belanja daerah meningkat menjadi sebesar Rp 13.034,68 Milyar dan upah minimum meningkat menjadi sebesar Rp 1961355.

**Gambar 1.4 Pergerakan Indeks Gini**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2014-2018

Indeks gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai indeks gini berkisar antara 0 hingga 1. Indeks gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, sebaliknya jika bernilai 1 atau semakin mendekati 1 maka setiap orang memiliki pendapatan yang berbeda dan itulah yang kemudian dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Dengan adanya ketimpangan pendapatan maka konsumsi masyarakat pun akan berbeda, jika semakin timpang tentunya banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari sandang, papan, pangan serta pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul ”*Confirmatory Factor Analysis* Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada tahun 2015 IPM mengalami peningkatan tetapi kemiskinan dan pengangguran juga terus meningkat.
2. IPM terus meningkat tetapi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan di tahun 2015 dan 2017
3. IPM terus meningkat tetapi kesehatan mengalami penurunan di tahun 2014

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi diatas, maka penulisan membatasi masalah agar tetap terfokus pada pokok permasalahan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, maka penulis membatasi masalah hanya pada dimensi indeks pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang ditinjau dari kemiskinan, pengangguran, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, kesehatan, belanja daerah dan indeks gini.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Faktor manakah (kemiskinan, pengangguran, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, kesehatan, belanja daerah dan indeks gini) yang relevan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah faktor-faktor relevan tersebut merupakan faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara?

### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor manakah (kemiskinan, pengangguran, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, kesehatan, belanja daerah dan indeks gini) yang relevan

mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.

- b. Untuk menganalisis dan mengetahui signifikansi faktor-faktor yang relevan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.

## **2. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah

Setelah mengetahui pengaruh kemiskinan, pengangguran, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, kesehatan, belanja daerah dan indeks gini, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu referensi dan acuan yang dipertimbangan pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan yang menyangkut indeks pembangunan manusia dalam rangka pencapaian tujuan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur merata.

- b. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, penulis dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, mampu mencari jawaban atas suatu permasalahan melalui penelitian yang dilakukan, mampu mengembangkan pengetahuan penulis menjadi lebih mendalam, dan mampu memberikan sedikit kontribusi bagi pengetahuan di bidang sumber daya.

c. Bagi Universitas

Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan atau sedang dilakukan bagi para akademisi di Universitas Pembanguna Panca Budi, baik oleh mahasiswa ataupun dosen, dan diharapkan penelitian ini dapat merangsang para akademisi untuk terus melakukan penelitian untuk mengharumkan nama universitas, dan dapat dijadikan salah satu referensi penelitian yang dilakukan untuk penelitian selanjutnya.

## F. Keaslian Penelitian

Berbagai penelitian yang berhubungan dengan penelitian indeks pembangunan manusia telah dilakukan penelitian sebelumnya salah satunya Syamsul Arifin (2016), dengan judul: “Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Sedangkan penelitian saat ini berjudul: “*Confirmatory Factor Analysis* Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara”.

Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2 Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang**

No	Item	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Judul Penelitian	Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam	<i>Confirmatory Factor Analysis</i> Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara



2.	Variabel Penelitian	Menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu: kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan ketimpangan distribusi pendapatan dan menggunakan 1 (satu) variabel terikat yaitu indeks pembangunan manusia	Menggunakan 8 (delapan) variabel bebas yaitu: kemiskinan, pengangguran, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, kesehatan, belanja daerah dan indeks gini dan 1 (satu) variabel terikat yaitu indeks pembangunan manusia
3.	Metode Penelitian	Regresi Linier Berganda	<i>Confirmatory Factor Analysis (CFA)</i> .
4.	Tempat Penelitian	Lampung	Sumatera Utara
5.	Tahun Penelitian	Periode data tahun 2010-2016	Periode data tahun 2002-2017

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Indeks Pembangunan Manusia**

Pada dekade 1990-an, definisi pembangunan telah semakin berkembang dengan didukung oleh pembangunan manusia (*human development*) sehingga terbentuk definisi pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*). Pada 1990 indeks dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks ini dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, dan paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) (Septiarini dan Herianingrum, 2017:31).

Perkembangan pembangunan manusia di Indonesia, seperti disebutkan dalam "*Indonesia Human Development Report 2004*" (UNDP), sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal tahun 1970-an sampai akhir 1990-an. Pertumbuhan ekonomi memungkinkan penduduk untuk mengalokasikan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan menjadi lebih banyak. Sementara itu, pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif sedikit. Kebutuhan akan

peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah untuk kedua bidang sosial tersebut makin sangat dibutuhkan sejak krisis ekonomi menerpa (Kuriata Ginting et.al, 2008:19).

Pada tahun 1990, UNDP memperkenalkan suatu indikator yang telah dikembangkannya, yaitu suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Pratowo 2013). Alat ukur ini diluncurkan oleh Mahbub ul Haq dalam bukunya yang berjudul *Reflections on Human Development*, dan telah disepakati dunia melalui *United Nation Development Programme* (UNDP).

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia (Basuki dan Saptutyningasih, 2016:1):

- a. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran
- b. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas *gross enrollment ratio* (bobot satu per tiga).
- c. Standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Setiap tahun daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian di atas. Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan. Modal dalam arti luas

memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Mengacu pada man Dixon dan World Bank, modal dalam arti luas, meliputi modal fisik (*physical capital*), modal manusia (*human capital*) dan modal alam (*naturalcapital*). Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang dicapai sangat tergantung kepada peningkatan pembentukan modal dalam arti luas, baik pembentukan modal fisik, modal manusia maupun modal alam. Menurut World Bank, modal fisik, modal manusia dan modal alam merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan (Abbas, 2010:2).

Sebagian ahli berpendapat bahwa pembangunan tidak hanya semata-mata dalam bentuk fisik, infrastruktur, namun dalam paradigma baru pembangunan adalah bagaimana pembangunan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi semua warga negara dari segi manusianya, jadi fokus utama pembangunan adalah bagaimana manusia sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pendapat Kuncoro yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi, dan pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan manusia (SDM) dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai "instrumen" atau salah satu "faktor produksi" saja, bukan merupakan subyek dari pembangunan. Hal ini telah mereduksi manusia sebagai penghambat maksimalisasi kepuasan maupun maksimalisasi keuntungan belaka (Heriyanto, 2010:6).

Pengertian pembentukan modal manusia adalah “proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara, pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (Jhingan, 2014:414).

Modal manusia kini dipandang sebagai mesin pertumbuhan utama yang memiliki peranan menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pentingnya modal manusia dalam pertumbuhan ekonomi telah mendorong sejumlah ahli ekonomi pembangunan memusatkan kajiannya pada peranan modal manusia dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Abbas, 2010).

## **2. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah atau negara, yang mengombinasikan pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan (Todaro, 2006:19)

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui

peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia (Kahang, 2016:132).

*The United Nations Development Program* (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperluas pilihan masyarakat. Paling penting adalah pilihan untuk berumur panjang dan sehat, mendapat pendidikan yang cukup dan menikmati standar hidup yang layak. UNDP telah menyusun kuran alternatif tentang kesejahteraan, yaitu *The United Nations Development Program* (indeks pembangunan manusia). Menurut Schultz, ada lima cara pengembangan sumber daya manusia (Hakim 2002:53):

- a. Fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat.
- b. Latihan jabatan, termasuk megang model lama yang diorganisasikan oleh perusahaan.
- c. Pendidikan yang di organisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah dan tinggi.
- d. Program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan, termasuk program ekstension khususnya pada pertanian.
- e. Migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah.

Secara khusus, Indek Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen

yaitu; angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah 8 kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

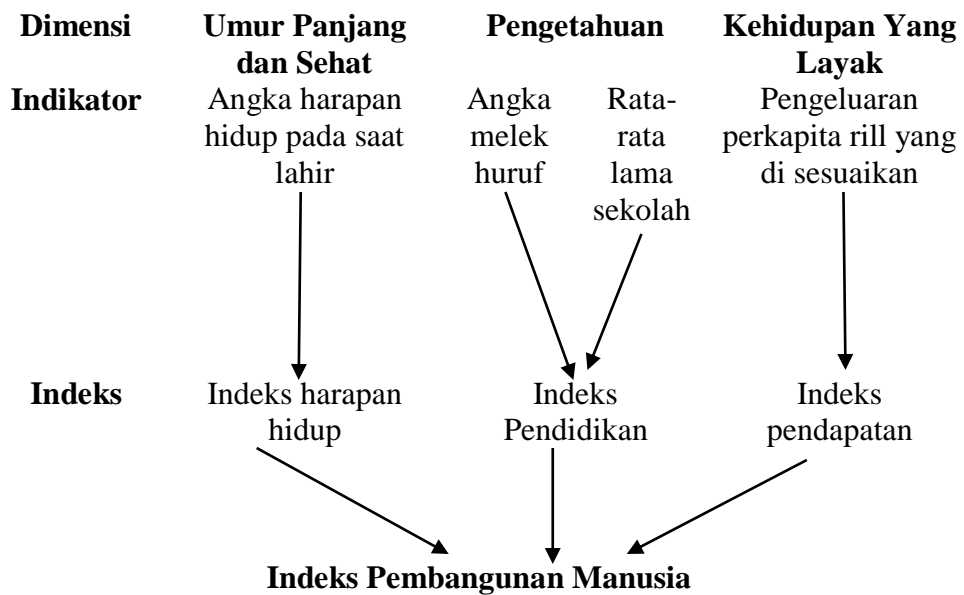
### **3. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia**

Penjelasan di dalam indeks pembangunan Manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan Manusia suatu Negara, yaitu (Beik dan Arsyianti, 2016:147):

- a. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
- b. Tingkat pendidikan diukur dengan angka harapan lama sekolah (dengan bobot dua per tiga) dan angka lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
- c. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan hidup layak. Seperti terlihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.1 Diagram Penghitungan IPM**



*Sumber :Heriyanto, 2015:8*

Pada tahun 2010, UNDP telah menyempurnakan metode tersebut dengan metode baru yaitu dengan mengganti komponen sebelumnya yaitu angka melek huruf menjadi angka harapan lama sekolah. Alasan mengapa angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah adalah bahwa angka melek huruf sudah tidak efektif lagi karena angka tersebut sudah besar diseluruh Indonesia sehingganya sudah tidak efektif apabila masih menggunakan angka melek hidup.

#### **4. Indeks Pembangunan Manusia Tradisional**

Indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur status komparatif pembangunan sosio-ekonomi disajikan dalam laporan-laporan tahunan UNDP yang berjudul *Human Depelopment Report* (Laporan Pembangunan Manusia). Inti semua laporan ini, yang dimulai pada tahun 1990, adalah pembuatan dan penyempurnaan Indeks Pembangunan



Manusia (*Human Development Index- HDI*). HDI berusaha memeringkat semua negara dengan skala 0 (pembangunan manusia rendah) sampai (pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan pada tiga tujuan atau produk akhir pembangunan, yaitu (Todaro dan Smith, 2011:57) :

- a. Masa hidup (*longevity*) yang diukur melalui harapan hidup setelah lahir.
- b. Pengetahuan yang diukur dengan bobot rata-rata tingkat melek aksara orang dewasa dengan bobot dua per tiga, dan rasio partisipasi sekolah bruto (*gross school enrollment ratio*) dengan bobot satu per tiga.
- c. Standar hidup yang diukur didasarkan produk domestik bruto per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli mata uang setiap negara yang nilainya berbeda-beda untuk mencerminkan biaya hidup dengan asumsi utilitas marginal yang semakin menurun (*diminishing marginal utility*) pendapatan.

## **5. Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru**

Pada bulan November 2010, UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia yang baru (*New Human Development Index- NHDI*). Indeks ini masih berdasarkan standar hidup, pendidikan dan kesehatan, akan tetapi indeks baru ini memiliki delapa perubahan, yakni (Todaro dan Smith, 2011:65-66) :

- a. Pendapatan nasional bruto (GNI) menggantikan produk domestik bruto (GDP) per kapita.
- b. Indeks pendidikan telah dirubah secara keseluruhan. Dua komponen baru telah ditambahkan yaitu rata-rata pencapaian pendidikan aktual

seluruh penduduk dan pencapaian pendidikan yang diharapkan dari anak-anak di masa kini. Masing-masing perubahan ini menimbulkan implikasi. Jelas sekali bahwa penggunaan ukuran pencapaian pendidikan aktual atau rata-rata lama bersekolah sebagai indikator merupakan perbaikan yang tidak ambigu. Estimasi dimutakhirkan secara teratur dan statistik dengan mudah diperbandingkan secara kuantitatif antar negara.

- c. Pencapaian pendidikan yang diharapkan adalah komponen baru lainnya yang tidak ambigu, ukuran ini merupakan peramalan yang dilakukan PBB, bukan pencapaian.
- d. Dua komponen yang sebelumnya dipakai sebagai indikator dalam indeks pendidikan yakni angka melek aksara dan partisipasi sekolah, tidak dipergunakan lagi.

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Komponen IPM**

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup (tahun)	85	20	Standar BPS
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	18	0	Standar BPS
Rata-rata sekolah (tahun)	15	0	Standar BPS
Daya Beli (tahun)	26.572.352	1.007.436	Standar BPS

Sumber Badan Pusat Statistik, 2014

Untuk menghitung masing-masing komponen tersebut dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Dimensi Kesehatan : } I_{\text{Kesehatan}} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$$

$$\text{Dimensi Pendidikan : } I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS \text{ min}}{HLS \text{ maks} - HLS \text{ min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ maks} - RLS \text{ min}}$$

$$I_{\text{Pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} - I_{\text{RLS}}}{2}$$

$$\text{Dimensi Pengeluaran : } I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran min})}{\ln(\text{pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran min})}$$

Dimana :

I : Indeks

AHH : Angka Harapan Hidup

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

Setelah semua dihitung, Rumus umum yang digunakan untuk Menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt{I_{\text{Kesehatan}} + I_{\text{Pendidikan}} + I_{\text{Pendapatan}}}$$

Dimana :

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

$I_{\text{Kesehatan}}$  : Indeks Kesehatan

$I_{\text{Pendidikan}}$  : Indeks Pendidikan

$I_{\text{Pendapatan}}$  : Indeks Pendapatan

Setelah melakukan perhitungan akan ditemukan hasil berupa angka skor berkisar antara 0-100. UNDP membagi tingkat status Pembangunan Manusia suatu wilayah kedalam empat golongan yaitu (Badan Pusat Statistik, 2017):

- a.  $IPM < 60$  : IPM rendah
- b.  $60 < IPM < 70$  : IPM sedang
- c.  $70 < IPM < 80$  : IPM tinggi
- d.  $IPM < 80$  : IPM sangat tinggi

## 6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

### a. Kemiskinan

Bank Dunia (2014) yang menjelaskan bahwa kemiskinan telah menunjukkan bahwa adanya tiga dimensi (aspek atau segi) yaitu: pertama, kemiskinan itu multidimensional. Artinya karena kemiskinan itu bermacam-macam sehingga memiliki banyak aspek. Kedua, aspek-aspek kemiskinan tadi saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ketiga, bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individual maupun secara kolektif. Sedangkan kemiskinan menurut Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau

sekelompok yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bapenas, 2004)

Kemiskinan menurut Shirazi dan Pramanik adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman. Baik di tinjau dari segi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Dalam proses pembangunan suatu negara ada tiga macam kemiskinan antara lain (Sartika, et. al 2016:7) :

- 1) Miskin karena miskin, kemiskinan ini disebabkan kemiskinan yang merupakan akibat rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan kurang memadai, dan kurang terolahnya potensi ekonomi dan seterusnya.
- 2) Kemiskinan yang sebenarnya tidak perlu terjadi di tengah-tengah kelimpahan, kemiskinan yang disebabkan oleh buruknya daya beli dan sistem yang berlaku.
- 3) Kemiskinan yang disebabkan karena tidak meratanya serta buruknya perdistribusian produk nasional total

Kemiskinan suatu daerah dapat digolongkan sebagai, pertama, *persistent proverty*, yaitu kemiskinan yang kronis atau turun-temurun. Daerah seperti ini umumnya merupakan daerah-daerah yang krisis sumber daya alamnya, atau daerah yang terisolasi. Kedua adalah *cyclical proverty*, yaitu kemiskinan yang meliputi pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Ketiga, adalah *seasonal proverty*, yaitu kemiskinan musim seperti sering dijumpai pada kasus nelayan dan

pertanian tanaman pangan. Keempat adalah *eccidental proverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak daerah suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Sartika, et. al. 2016:7).

Metode yang digunakan BPS 2014 adalah menghitung garis kemiskinan (KG) yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Perhitungan Garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan (Badan Pusat Statistik, 2017)

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Ke-52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin (Sartika et. al, 2016:9)

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di

perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Selain itu, dimensi lain yang harus diperhatikan adalah tingkat kedalaman dankeparahan kemiskinan.

#### **b. Pengangguran**

Menurut Sukirno (2004:28) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Dari tahun ketahun pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan. Apalagi di era globalisasi ini persaingan tenaga kerja semakin ketat terutama karena dibukanya perdagangan bebas yang memudahkan penawaran tenaga kerja asing yang diyakini lebih berkualitas masuk ke dalam negeri.

Pada masa sekarang usaha-usaha mengurangi pengangguran adalah dengan menggunakan rencana pembangunan ekonomi yang menyertakan rencana ketenagakerjaan secara matang. Di samping itu, disertai pula kesadaran akan ketenagakerjaan yang lebih demokratis menyangkut hak-hak memilih pekerjaan, lapangan pekerjaan, lokasi pekerjaan sesuai kemampuan, kemauan tenaga kerja tanpa

diskriminasi. Menurut Sukirno (2008:323-331), pengangguran biasanya dibedakan atas empat jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

- 1) Pengangguran friksional, yaitu pengangguran normal yang terjadi jika ada 2-3% maka dianggap sudah mencapai kesempatan kerja penuh. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik.
- 2) Pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi karena merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja.
- 3) Pengangguran struktural, yaitu pengangguran karena kemerosotan beberapa faktor produksi sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerja diberhentikan.
- 4) Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena tenaga manusia digantikan oleh mesin industri.

Sedangkan bentuk-bentuk pengangguran berdasarkan cirinya dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Pengangguran Musiman, adalah keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Sebagai contoh, petani yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian, dan sebagainya.



- 2) Pengangguran Terbuka, pengangguran yang terjadi karena pertambahan lapangan kerja lebih rendah daripada pertambahan pencari kerja
- 3) Pengangguran Tersembunyi, pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien.
- 4) Setengah Menganggur, yang termasuk golongan ini adalah pekerja yang jam kerjanya dibawah jam kerja normal (hanya 1-4 jam sehari). Disebut *Underemployment*.

**c. Upah Minimum**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 31 defisini upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah minimum adalah upah yang paling rendah untuk setiap jam, setiap hari atau setiap bulan yang dapat diterima oleh setiap tenaga kerja atau buruh (Wirawan, 2015:394).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 pada pasal 89 dijelaskan bahwa upah minimum terdiri dari upah minimum terdiri atas:

- 1) Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- 2) Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

**d. Pertumbuhan Ekonomi**

Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses, bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah serta pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan agar pembangunan sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi serta prioritas daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (Badan Pusat Statistik, 2016).

Menurut Tarigan (2004), cara untuk menghitung angka-angka PDRB terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Metode Pengeluaran.

Dengan metode ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlah pengeluaran ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negara tersebut. Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi dan pengeluaran pemerintah serta pendapatan ekspor dikurangi dengan pengeluaran untuk barang-barang impor.

2) Metode Produksi.

Dengan metode ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian. Dalam menghitung pendapatan nasional dengan cara produksi yang dijumlahkan hanyalah nilai produksi tambahan atau *value added* yang diciptakan.

3) Metode Pendapatan.

Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.

Setelah melihat pada uraian PDRB di atas dapat diambil kesimpulan bahwa PDRB merupakan nilai secara keseluruhan dari

barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat/warga dalam suatu wilayah atau daerah dalam waktu tertentu (satu tahun). PDRB juga merupakan ukuran laju pertumbuhan suatu daerah. PDRB dalam hal ini juga dapat berarti jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

**e. Tingkat Pendidikan**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Dengan kata lain, pendidikan adalah suatu modal utama seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang tidak berpendidikan. Jadi, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula pendapatan yang diterima.

Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, Bab V Pasal 12 ayat 1). Pendidikan berguna untuk proses kehidupan sekarang dan untuk masa yang akan datang, sedang pendidikan meliputi: pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang mempunyai

bentuk/organisasi tertentu yang terdapat di sekolah dan universitas. Dalam pendidikan formal terdapat perjenjangan dalam tingkat persekolahan yang meliputi : (1) SD, (2) SLTP, (3) SMU, (4) Perguruan tinggi. Pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengembangkan sumber daya manusia. Pendidikan dan latihan tidak saja menambah pengetahuan tetapi juga meningkatkan ketrampilan bekerja seseorang.

**f. Kesehatan**

Kesehatan merupakan tingkat efisiensi fungsional dari makhluk hidup. Pada manusia, kesehatan merupakan kondisi umum dari pikiran dan tubuh seseorang, yang berarti bebas dari segala gangguan penyakit dan kelainan (Sembiring, R, 2017:5).

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif baik secara ekonomi maupun sosial. Kesehatan tidak hanya mempunyai dimensi fisik, mental dan sosial saja, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi. Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, diperlukan kesehatan yang lebih baik. Pembangunan manusia memperluas pilihan-pilihan manusia dengan mensyaratkan berumur panjang (Notoamodjo, 2008:197).

Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator angka harapan hidup (AHH) saat lahir ( $e_0$ ). Indikator ini menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup menggambarkan derajat

kesehatan penduduk di suatu wilayah. Angka ini dapat diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya. Angka ini sebenarnya dapat dihitung dengan menggunakan tabel kematian (*life table*), tetapi karena data kematian menurut kelompok umur tidak tersedia, maka cara ini tidak dapat dilakukan. Perhitungan angka harapan hidup dilakukan dengan metode tidak langsung (*indirect method*).

Angka harapan hidup ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung kehidupan masyarakat, seperti sarana kesehatan yang tersedia, peningkatan pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat, fasilitas lingkungan yang tersedia untuk kebutuhan sehari-hari serta kebiasaan hidup masyarakat itu sendiri.

Dalam indeks pembangunan manusia juga terdapat indeks kesehatan yang didalamnya terdapat angka harapan hidup, dimana orang yang memiliki kesehatan yang baik akan memiliki umur panjang yang kemungkinan besar juga dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. Permasalahan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya (Arifin, 2015)

### **g. Belanja Daerah**

Belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan dari basis akrual adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Halim, 2012:108). Belanja daerah adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan jasa potensial periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva atau terjadinya kewajiban yang ditimbulkan karena pengurangan dalam aktiva/ekuitas neto, selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri (Bastian, 2006:101).

Menurut Halim (2012:107), klasifikasi belanja daerah yang digunakan dalam laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

#### 1) Belanja Operasi,

Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi :

- a) Belanja Pegawai;
- b) Belanja Barang;
- c) Subsidi;
- d) Hibah;
- e) Bantuan Sosial;

#### 2) Belanja Modal,

Pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai asset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi:

- a) Belanja Modal Tanah;
  - b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
  - e) Belanja Modal Asset tetap lainnya;
  - f) Belanja Asset lainnya;
- 3) Belanja Lain-lain/Belanja Tidak Terduga

Pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4) Belanja Transfer

Pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.



Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang belanja dikelompokkan menjadi:

1) Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja:

- a) Belanja Pegawai;
- b) Belanja Barang dan Jasa;
- c) Belanja Modal;

2) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a) Belanja Pegawai;
- b) Belanja Bunga;
- c) Belanja Subsidi;
- d) Belanja Hibah;
- e) Belanja Bantuan Sosial;

f) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa;

Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah.

#### **h. Indeks Gini atau Rasio Gini**

Gini Rasio digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran gini rasio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila gini rasio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila gini rasio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi (Todaro, 2006).

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai Gini Rasio adalah :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10000}$$

Keterangan :

G = Gini Rasio

P<sub>i</sub> = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q<sub>i</sub> = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i

Q<sub>i-1</sub> = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

k = Banyaknya kelas pendapatan

Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan.

## B. Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2.2 Mapping Penelitian Sebelumnya**

No	Nama / Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Rahmad Sembiring (2017)	Dampak Perubahan Sosial Dalam Mempengaruhi Dan Kemiskinan Keluarga Nelayan Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram	Dampak Sosial Pendidikan (X1)  Dampak Sosial Kesehatan (X2)	Kemiskinan Pendapatan (Y)	Regresi Bergada	Variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan pada pendapatan nelayan di kelurahan pahlawan. Hal ini disebabkan bahwa pendidikan mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan.

2	Riana Puji Lestari (2016)	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Islam Tahun 2011-2016	IPM (X <sub>1</sub> ) Pengangguran (X <sub>2</sub> ) PDRB (X <sub>3</sub> )	Kemiskinan (Y)	Regresi Berganda	Hasil menyimpulkan bahwa variabel IPM berpengaruh secara negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung. PDRB berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung
3	Syamsul Arifin (2016)	Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam	Kemiskinan (X <sub>1</sub> ) Pengeluaran Pemerintah (X <sub>2</sub> ) Ketimpangan Distribusi Pendapatan (X <sub>3</sub> )	IPM (Y)	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan garis kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, tidak adanya pengaruh dan tidak signifikan pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia, tidak adanya pengaruh dan tidak signifikan ketimpangan distribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4	Mirza (2011)	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah	Kemiskinan (X <sub>1</sub> ) Pertumbuhan Ekonomi (X <sub>2</sub> ) Belanja Modal (X <sub>3</sub> )	IPM (Y)	Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen indeks pembangunan

						manusia
5	Bhakti (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012	PDRB (X <sub>1</sub> ) APBD (X <sub>2</sub> ) Rasio Ketergantungan (X <sub>3</sub> ) Kemiskinan (X <sub>4</sub> )	IPM (Y)	Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel PDRB dan variabel APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel rasio ketergantungan dan variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
6	Tri (2015)	Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah	Pengeluaran Bidang Kesehatan (X <sub>1</sub> ) Pengeluaran Bidang Pendidikan (X <sub>2</sub> ) Jumlah Penduduk Miskin (X <sub>3</sub> )	IPM (Y)	Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia
7	Asmita, Fitrawaty, & Ruslan, (2017)	<i>Analysis of Factors Affecting the Human Development Index in North Sumatra Province</i>	Pertumbuhan Ekonomi (X <sub>1</sub> ) Pengeluaran Pendidikan (X <sub>2</sub> ) Pendapatan (X <sub>3</sub> ) Pengeluaran Kesehatan (X <sub>4</sub> )	IPM (Y)	Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel kemiskinan, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, dan pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh positif

						signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
8	Basuki & Saptutyningih (2013)	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pembangunan Manusia Tahun 2008-2014 Studi Kasus Kab/Kota D.I. Yogyakarta	Pendapatan Perkapita (X <sub>1</sub> ) Pengeluaran Kesehatan (X <sub>2</sub> ) Pengeluaran Fasilitas Umum (X <sub>3</sub> ) Rasio Gini (X <sub>4</sub> ) Jumlah Penduduk Miskin (X <sub>5</sub> )	IPM (Y)	Regresi Dta Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pengeluaran pemerintah untuk fasilitas umum, rasio gini dan jumlah penduduk miskin berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
9	Pratowo (2010)	Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Belanja Daerah (X <sub>1</sub> ) Pengeluaran Non Makanan (X <sub>2</sub> ) Rasio Gini (X <sub>3</sub> ) Rasio Ketergantungan (X <sub>4</sub> )	IPM (Y)	Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja daerah per kapita dan Proporsi pengeluaran nonmakanan perkapita berpengaruh secara positif signifikan. Variabel gini rasio dan rasio ketergantungan berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia
10	Amalina (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2014	Jumlah Penduduk Miskin (X <sub>1</sub> ) Pendidikan (X <sub>2</sub> ) PDRB (X <sub>3</sub> ) Jumlah distribusi alat kesehatan (X <sub>4</sub> )	IPM (Y)	Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel pendidikan dan PDRB perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel jumlah distribusi alat kesehatan berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks pembangunan

						manusia
11	Meliana & Zain (2013)	Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel	Partisipasi Sekolah ( $X_1$ ) Sarana Kesehatan ( $X_2$ ) Presensate Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih ( $X_3$ ) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( $X_4$ ) PDRB ( $X_5$ )	IPM (Y)	Regresi Data Panel	Variabel angka partisipasi sekolah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel jumlah sarana kesehatan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel presensate rumah tangga dengan akses air bersih memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Variabel PDRB perkapita memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia

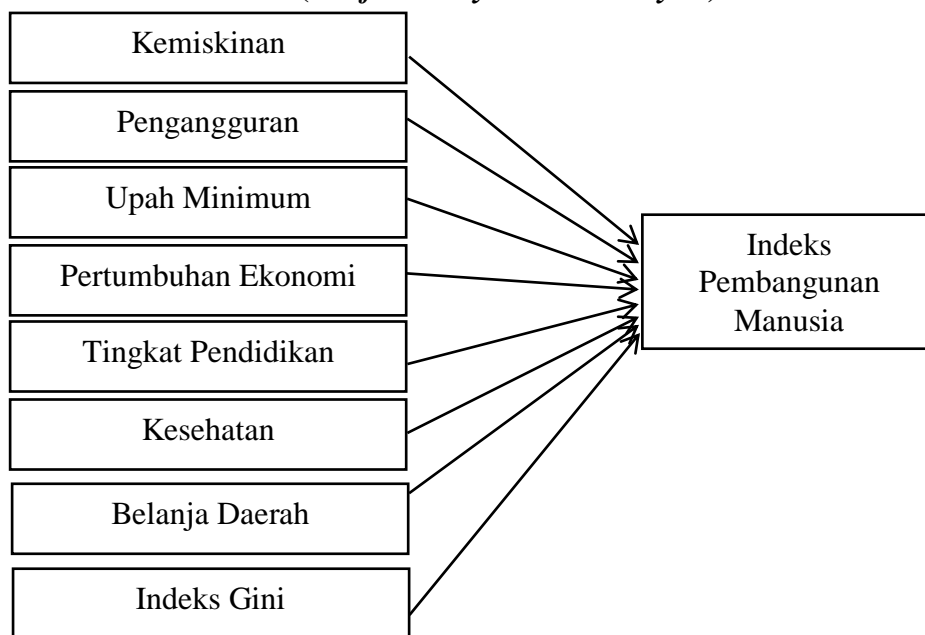
### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variable yang teliti. Sehingga secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variable independen dan dependen.

Perkembangan IPM sangat dipengaruhi oleh omponen-komponen penyusunnya. Untuk meningkatkan nilai IPM, pemerintahan harus mempunyai

komitmen untuk dapat meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Dalam penelitian ini bahwa indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh delapan faktor yang kemudian dijadikan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kemiskinan, pengangguran, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, kesehatan, belanja daerah dan indeks gini. Adapun kerangka yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian CFA  
(Confirmatory Faktor Analysis)**

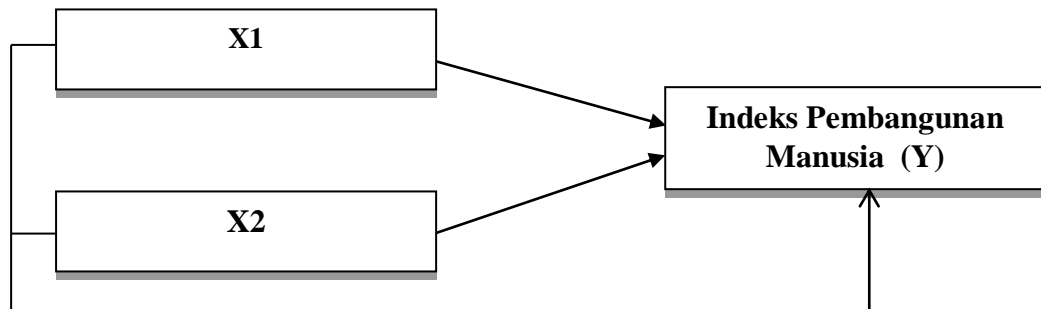


Keterangan:

- a. Variabel yang mempengaruhi variabel yang lain dalam penelitian ini adalah: kemiskinan (X1), pengangguran, (X2), upah minimum (X3), pertumbuhan ekonomi (X4), tingkat pendidikan (X5), kesehatan (X6) belanja daerah (X7) dan indeks gini (X8)
- b. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain dalam penelitian ini adalah investasi (Y).



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Konseptual Penelitian Setelah Uji CFA**  
*(Confirmatory Faktor Analysis)*



#### **D. Hipotesis**

Menurut Rusiadi (2013; 79), hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Semua faktor-faktor (kemiskinan, pengangguran, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, kesehatan, belanja daerah dan indeks gini) relevan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara.
2. Faktor-faktor yang relevan tersebut berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Menurut Rusiadi (2013:12), “Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala”. Penelitian ini membahas indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara dengan analisis factor CFA meliputi : kemiskinan, pengangguran, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, kesehatan, belanja daerah dan indeks gini.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan September 2019 sampai dengan Desember 2019. Berikut ini rincian waktu penelitian yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian**

No	Aktivitas	Bulan/Tahun											
		September, 2019			Oktober, 2019			Nopember, 2019			Desember, 2019		
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■	■	■									
2	Penyusunan Proposal		■	■	■								
3	Seminar Proposal				■								
4	Perbaikan Acc Proposal					■	■	■	■				
5	Pengolahan Data						■	■	■	■			
6	Penyusunan Skripsi								■	■	■	■	
7	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■
8	Meja Hijau												■

Sumber: Penulis (2019)

### C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional merupakan acuan dari kandasian teoritas yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu diberikan batasan operasional sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel	Skala
1	Kemiskinan (X1)	Kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bapenas, 2004)	Persentase jumlah penduduk miskin yang berada di Provinsi Sumatera Utara	Rasio
2	Pengangguran (X2)	Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. (Sukirno, 2004:28)	Data pengangguran di Provinsi Sumatera Utara	Rasio
3	Upah Minimum (X3)	Upah minimum adalah upah yang paling rendah untuk setiap jam, setiap hari atau setiap bulan yang dapat diterima oleh setiap tenaga kerja atau buruh (Wirawan, 2015:394).	Data persentase kenaikan upah minimum di Provinsi Sumatera Utara.	Rasio
4	Pertumbuhan Ekonomi (X4)	Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses,	Data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara	Rasio

		output per kapita, serta jangka panjang (Sukirno, 2000).		
5	Tingkat Pendidikan (X5)	Pendidikan adalah suatu modal utama seseorang untuk mendapatkan pekerjaan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).	Data rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Utara.	Rasio
6	Kesehatan (X6)	Kesehatan merupakan kondisi umum dari pikiran dan tubuh seseorang, yang berarti bebas dari segala gangguan penyakit dan kelainan (Sembiring, R, 2017:5).	Data angka harapan hidup di Provinsi Sumatera Utara.	Rasio
7	Belanja Daerah (X7)	Belanja daerah adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Halim, 2012:108).	Jumlah Belanja Daerah yang digunakan sebagai anggaran tahunan di Provinsi Sumatera Utara.	Rasio
8	Indeks Gini (X8)	Gini Rasio digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan (Todaro, 2006).	Gini Rasio yang digunakan adalah Indeks Koefisien Gini di Provinsi Sumatera Utara.	Rasio
9	Indeks Pembangunan Manusia (Y)	Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah atau negara, yang mengombinasikan pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan (Todaro, 2006:19)	Data IPM di Provinsi Sumatera Utara	Rasio

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Data Skunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk jadi dan dipublikasikan.

#### **a. Internet**

Adapun yang menjadi situs dari pencarian data yang berhubungan dengan tema atau penelitian ini, seperti [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan sebagainya.

#### **b. Riset Kepustakaan**

Riset kepustakaan adalah melakukan studi kepustakaan dengan pengumpulan data yang dilengkapi dengan membaca dan mempelajari serta menganalisis *literature* yang bersumber dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Terutama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.

## **E. Teknik Analisis Data**

### **1. Analisis Faktor (*Confirmatory Factor Analysis / CFA*)**

Analisis faktor adalah sebuah model, dimana tidak terdapat variabel bebas dan tergantung. Analisis faktor tidak mengklasifikasi variabel ke dalam kategori variabel bebas dan tergantung melainkan mencari hubungan interdependensi antar variabel agar dapat mengidentifikasi dimensi-dimensi atau faktor-faktor yang menyusunnya. Analisis faktor pertama kali dilakukan oleh Charles Spearman, dengan tujuan utama analisis faktor adalah menjelaskan hubungan diantara banyak variabel dalam bentuk beberapa faktor, faktor-

faktor tersebut merupakan besaran acak (*random quantities*) yang dapat diamati atau diukur secara langsung.

Menurut Sarwono, (2012), kegunaan utama analisis faktor ialah melakukan pengurangan data atau dengan kata lain melakukan peringkasan sejumlah variabel yang akan menjadi kecil jumlahnya. Pengurangan dilakukan dengan melihat interdependensi beberapa variabel yang dapat dijadikan satu yang disebut faktor. Sehingga ditemukan variabel-variabel atau faktor-faktor yang dominan atau penting untuk dianalisis lebih lanjut. Persamaan atau rumus analisis faktor adalah sebagai berikut:

$$X_i = A_{i1} F_1 + A_{i2} F_2 + A_{i3} F_3 + A_{i4} F_4 + \dots + V_i U_i$$

Dimana:

$F_i$  = Variabel terstandar ke-I

$A_{i1}$  = Koefisien regresi dari variabel ke I pada *common* faktor I

$V_i$  = Koefisien regresi terstandar dari variabel I pada faktor unik ke I

$F$  = *Common* faktor

$U_i$  = Variabel unik untuk variabel ke I

$M$  = Jumlah *common* faktor

Secara jelas *common* faktor dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$F_i = W_{i1} X_1 + W_{i2} X_2 + W_{i3} X_3 + \dots + W_{ik} X_k$$

Dimana:

$F_i$  = Faktor ke I estimasi

$W_I$  = Bobot faktor atau skor koefisien faktor

$X_K$  = Jumlah variabel

Prinsip utama analisis faktor adalah korelasi, maka asumsi-asumsi yang terkait dengan metode statistik korelasi:

- a. Besar korelasi atau korelasi antar independen variabel harus cukup kuat.
- b. Besar korelasi parsial, korelasi antar dua variabel dengan menganggap tetap variabel yang lain.
- c. Pengujian sebuah matriks korelasi diukur dengan besaran *Barlett Test Of Sphericity* atau dengan *Measure Sampling Adequacy (MSA)*.

Setelah sampel didapat dan uji asumsi terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses analisis faktor. Proses tersebut meliputi:

- a. Menguji variabel apa saja yang akan dianalisis.
- b. Menguji variabel-variabel yang telah ditentukan, menggunakan *Bartlett Test of Sphericity* dan MSA.
- c. Melakukan proses inti analisis faktor, yakni *factoring*, atau menurunkan satu atau lebih faktor dari variabel-variabel yang telah lolos pada uji variabel sebelumnya.
- d. Melakukan proses *factor rotation* atau rotasi terhadap faktor yang terbentuk. Tujuan rotasi untuk memperjelas variabel yang masuk ke dalam faktor tertentu.
- e. Interpretasi atau faktor yang telah terbentuk, yang dianggap bisa mewakili variabel-variabel anggota faktor tersebut.
- f. Validasi atas hasil faktor untuk mengetahui apakah faktor yang terbentuk telah valid.

Tahap pertama dalam analisis faktor adalah dengan menilai mana saja variabel yang dianggap layak untuk dimasukkan dalam analisis selanjutnya. Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan semua variabel yang ada dan kemudian pada variabel-variabel tersebut dikenakan sejumlah pengujian.

Logika pengujian adalah jika sebuah variabel memang mempunyai kecenderungan mengelompok dan membentuk sebuah faktor, variabel tersebut akan mempunyai korelasi yang cukup tinggi dengan variabel lain. Sebaliknya, variabel dengan korelasi yang lemah dengan variabel yang lain, akan cenderung tidak akan mengelompok dalam faktor tertentu.

Uji KMO dan *Bartlett Test*, memiliki beberapa hal yaitu angka KMO haruslah berada diatas 0,5 dan signifikan harus berada dibawah 0,05. sedangkan pada uji MSA angkanya haruslah berada pada 0 sampai 1, dengan kriteria:

- a.  $MSA = 1$ , Variabel dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel yang lain.
- b.  $MSA > 0,5$ , Variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut.
- c.  $MSA < 0,5$ , Variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.

Setelah satu atau lebih faktor terbentuk, dengan sebuah faktor berisi sejumlah variabel, mungkin saja sebuah faktor berisi sejumlah variabel yang split ditentukan akan masuk ke dalam faktor mana, maka proses selanjutnya adalah dengan melakukan proses rotasi yang akan memperjelas kedudukan sebuah variabel didalam sebuah faktor.



Menurut Rusiadi (2013:248), setelah diketahui faktor mana saja yang mewakili sebuah variabel dependent maka analisa selanjutnya dilakukan dengan regresi berganda.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias dan efisien (*Best Linear Unbias Estimator/BLUE*) dari suatu persamaan regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (*Least Squares*), perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan dengan jalan memenuhi persyaratan asumsi klasik yang meliputi :

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal. Asumsi ini harus terpenuhi untuk model regresi linier yang baik. Uji normalitas dilakukan pada nilai residual model. Asumsi normalitas dapat diperiksa dengan pemeriksaan *output* normal P-P plot. Asumsi normalitas terpenuhi ketika penyebaran titik-titik *output* plot mengikuti garis diagonal plot (Rusiadi, 2013:268).

Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan.

Pengujian ini diperlukan karena untuk melakukan uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Menurut

Ghozali (2011:201), ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik.

#### 1) Analisa Grafik

Untuk melihat normalitas data dapat dilakukan dengan melihat histogram atau pola distribusi data. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari nilai residualnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garfik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### 2) Analisa Statistik

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik Kolmogorov Smirnov (K-S). Pedoman pengambilan keputusan rentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov dapat dilihat dari:

- a) Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas  $< 0,05$ , maka distribusi data adalah tidak normal.
- b) Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas  $> 0,05$ , maka distribusi data adalah normal (Ghozali, 2011:98).

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan yaitu model yang terdapat

kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas (Rusiadi *et al*, 2013:157). Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Menurut Santoso (Rusiadi *et al*, 2013:154), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Dalam penelitian ini uji multikolienaritas menggunakan *Tolerance* dan VIF (*Varians Inflation Factor*).

- 1) Jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  dan VIF  $> 10$ , maka terdapat korelasi diantara salah satu variabel independen lainnya atau terjadi multikolienaritas.
- 2) Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ , maka tidak terjadi korelasi diantara salah satu variabel independen lainnya atau tidak terjadi multikolienaritas.

**3. Uji Hipotesis (Kesesuaian)**

**a. Uji t (parsial)**

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan uji t, yaitu menguji pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan (Rusiadi

*et al*, 2013:234). Untuk menguji signifikan pengaruh variabel menggunakan uji t dengan rumus:

$$t = \frac{r_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r_{xy})^2}}$$

Dengan taraf signifikan 5 % uji dua pihak dan  $dk = n-2$ , dan kriteria pengujian adalah :

*P value* (sig) < 0,05 =  $H_0$  ditolak

*P value* (sig) > 0,05 =  $H_0$  diterima

Dengan ketentuan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 = 0$ , suku bunga kredit, inflasi, PDB, tenaga kerja, ekspor, kurs dan konsumsi tidak berpengaruh secara parsial terhadap investasi di Indonesia.

$H_a \neq 0$ , suku bunga kredit, inflasi, PDB, tenaga kerja, ekspor, kurs dan konsumsi berpengaruh secara parsial terhadap investasi di Indonesia.

#### **b. Uji F (Serempak/simultan)**

Uji F-statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak yang berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Menurut Sugiyono (2012:257), nilai  $F_{hitung}$  dapat diperoleh dengan rumus:

$$F - hitung = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan :

$R^2$  = Koefisien Determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah sampel

Dengan kriteria pengujian pada tingkat kepercayaan  $(1-\alpha)$  100% sebagai berikut:

$H_0$  diterima, jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$

$H_0$  ditolak, jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$

#### 4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas (Rusiadi, 2013:317). Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel terikatnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Cara menghitung koefisien determinasi yaitu :

$$D = (r_{xy})^2 \cdot 100\%$$

Dimana :

D = Koefisien Determinan

$R_{xy}$  = Koefisien Korelasi *Product Momen*

## 5. Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar beberapa variabel (Rusiadi, 2013 : 138), dengan bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \varepsilon$$

Dimana:

$Y$  = Indeks Pembangunan Manusia

$a$  = Harga  $Y$  bila  $X_1$  dan  $X_2 = 0$  (harga konstan)

$\beta$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Kemiskinan

$X_2$  = Pengangguran

$X_3$  = Upah Minimum

$X_4$  = Pertumbuhan Ekonomi

$X_5$  = Tingkat Pendidikan

$X_6$  = Kesehatan

$X_7$  = Belanja Daerah

$X_8$  = Indeks Gini

$\varepsilon$  = Error Term

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Tarmizi. (2010). *Modal Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal E-Mabis FE-Unimal, Volume 11, Nomor 3.
- Andika, R. (2018). Pengaruh Kemampuan Berwirausaha dan Kepribadian Terhadap Pengembangan Karir Individu Pada Member PT. Ifaria Gemilang (IFA) Depot Sumatera Jaya Medan. *JUMANT*, 8(2), 103-110.
- Arifin, Muhammad Yuli. (2015). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Artikel Ilmiah Mahasiswa. Universitas Jember.
- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Atalay, R., (2015). *Science Direct The education and the human capital to get rid of the middle-income trap and to provide the economic development*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 174, pp.969–976. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.7>
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (2010)  
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  
(2011) Badan Perencanaan dan Pembangunan  
Nasional (2004) Badan Pusat Statistik 2007
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2011  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2014  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2015  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2016  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2017  
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018
- Bank Dunia. (2014). *Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Diakses pada 20 Juni 2015, dari <http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/reducing-extreme-poverty-in-indonesia>.
- Bastian, Ifan. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Basuki, Agus, Tri dan Saptutyingsih Endah (2016) *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008-2014 (Studi Kasus Kab/Kota DI Yogyakarta)*. *Jurnal Buletin Ekonomi* Vol. 14 No. 1 hal 1-20. ISSN 1410-2293

- Beik, Irfan Syauqi dan Arsyianti, Laily Dwi. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syari'ah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cremin, P. & Nakabugo, M.G., (2012). *Education, development and poverty reduction: A literature critique*. International Journal of Educational Development, 32(4), pp.499–506. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2012.02.015>
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, Abdul, (2002). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Pertama, Yogyakarta: Ekonosia.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, R. (2018). Pengaruh Kualitas produk Terhadap Kepuasan Pelanggan di Restoran Cepat saji Kfc Cabang Asia Mega Mas Medan. JUMANT, 7(1), 77-84.
- Harahap, R. (2018). ANALISA KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI CV. REZEKI MEDAN. JUMANT, 8(2), 97-102.
- Heriyanto, Dwi. (2010). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006-2010*. Jurnal Indeks Pembangunan Manusia.
- Jhingan, M.L. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kahang, Merang. et. al, (2016). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indkes Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Volume 18, (2).
- Kholik, K. (2017). THE EFFECT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ON WORK PRODUCTIVITY OF EMPLOYEES AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. ALFO CITRA ABADI MEDAN.
- Kholik, K. (2018, October). Effect of Self-Efficacy and Locus of Control on Small and Medium Entertainment Small Scale. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 214-225).
- Kristianto, D. Prasetya, B., (2017). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan (Pendekatan Moneter dan Multidimensi) di Indonesia Indonesian*. Journal of Computing and Cybernetics Systems
- Kuriata. Ginting. C., et. al. (2018). *Pembangunan Manusia Di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.4, No.1.
- Mesra, B. (2018). Factors That Influencing Households Income And Its Contribution On Family Income In Hamparan Perak Sub-District, Deli Serdang Regency, North. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(10), 461-469.



- Mirza, Denni. (2012). *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006 2009*. Semarang: Jurnal Economics Development Analysis Journal.
- Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). Country of origin as a moderator of halal label and purchase behaviour. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2).
- Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Achmad Daengs, G. S., Sahat, S., Rosmawati, R., Kurniasih, N., ... & Rahim, R. (2018). Decision support rating system with Analytical Hierarchy Process method. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.3), 105-108.
- Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). Country of origin as a moderator of halal label and purchase behaviour. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2).
- Notoamodjo, Soekidjo. (2018). *Kesehatan Dan Sumberdaya Manusia*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 2, No. 5 e-ISSN 2460-0601.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pratowo, Nur Isa (2013) *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Jurnal Studi Ekonomi Indonesia.
- Rusiadi, et. el. (2013). *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi Pembangunan Konsep Kasus Dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos Dan Lisrel*. Medan: USU Press.
- Sartika, Cica. et. al (2016). *Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna*. Jurnal Ekonomi Vol. 1 No. 1 E-ISSN: 2503-1937, Halaman : 106-118
- Sarwono, Jonathan. (2012). *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS (Edisi Pertama)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sembiring, Rahmad. (2017). *Dampak Perubahan Sosial Dalam Mempengaruhi Dan Kemiskinan Keluarga Nelayan Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram*. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik. Vol. 2 No 2. ISSN : 22527-2772
- Septiarini, Maya Masita dan Herianingrum, Sri, (2017). *Analisis I-Hdi (Islamic-Human Development Index) Di Jawa Timur* , Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 5.
- Setiawan, N., Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Tambunan, A. R. S., Girsang, M., Agus, R. T. A., ... & Nisa, K. (2018). Simple additive weighting as decision support system for determining employees salary. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.14), 309-313.

- Setiawan, N. (2018). PERANAN PERSAINGAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN (Resistensi Terhadap Transformasi Organisasional). JUMANT, 6(1), 57-63.
- Siregar, N. (2018). Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoeng Deli Medan. JUMANT, 8(2), 87-96.
- Siregar, N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Menggunakan Indihome Sebagai Penyedia Jasa Internet Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Plaza Telkomcabang Iskandar Muda No. 35 Medan Baru). JUMANT, 7(1), 65-76.
- Siregar, N. (2018). ANALISIS PRODUK DAN CITRA KOPERASI TERHADAP WIRAUSAHA KOPERASI DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT DESA LUBUK SABAN PANTAI CERMIN KABUPATEN DELI SERDANG. JUMANT, 9(1), 79-93.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. (1997). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Edisi Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono. (2000). *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2008). *Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2010). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, Dan Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub.
- Tarigan, Robinson. (2004). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Todaro, Michael P. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2011). *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan, Jilid I)*. Jakarta : Erlangga
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wirawan. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.